

## **Kebijakan Perencanaan Pembangunan: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur (Systematic Literatur Review)**

**Fikry Asyaif Hamas<sup>1</sup>, Salahudin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Malang, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Malang

e-mail: <sup>1</sup>vikryhamas5@gmail.com

e-mail: <sup>2</sup>salahudinmsi@umm.ac.id

**Abstrak** : Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat sebuah proses kebijakan dalam perencanaan pembangunan di terapkan. Didasari oleh sebuah kebijakan pemerintah yang memiliki peran penting dalam sebuah pemberian kebijakan dalam rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode literatur dengan menggunakan pendekatan studi literatur dengan mengkaji dari beberapa artikel jurnal internasional yang diakses dari Scopus, dengan kata lain penelitian ini menggunakan bahan-bahan pustaka tanpa melakukan riset lapang. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keberlangsungan dari sebuah pembangunan tentu didasari oleh sebuah kebijakan dan perencanaan. Dimana kedua aspek tersebut harus dirumuskan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan. Kebijakan perencanaan pembangunan tentu memerlukan sebuah proses yang harus didasari dari kebutuhan suatu daerah atau negara. Kebijakan perencanaan tersebut perlu dilakukan dengan melihat beberapa aspek penting seperti penggunaan lahan, urbanisasi, dukungan negara dan masyarakat, zona pembangunan, mitigasi perubahan iklim dan kerjasama. Tentu dalam hal ini kebijakan regulasi perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan yang logis. Dalam proses tersebut pemerintah perlu melibatkan stakeholder dan masyarakat dengan mengkaji apa saja hal yang dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan sehingga melahirkan kebijakan atau regulasi yang baik dan saling menguntungkan. Temuan menunjukkan pentingnya kerjasama dan partisipasi luas dari berbagai pemangku kepentingan, pengelolaan budaya yang baik. Keterbatasan tulisan ini adalah kurangnya data yang dikaji secara nasional dikarenakan tulisan ini dikaji dari artikel yang berbasis internasional, namun disisi lain tulisan ini dapat dikatakan sesuai dengan dasar dari kebijakan perencanaan pembangunan. Dengan begitu, karya tulis berikutnya perlu dilakukan dengan membandingkan terhadap penerapan kebijakan perencanaan pembangunan yang lebih terkonsep.

**Kata Kunci:** *Kebijakan, Perencanaan, Masyarakat, Pembangunan.*

**Abstract:** This study aims to see a policy process in development planning applied. Based on a government policy that has an important role in a policy provision in a series of concepts and principles that serve as guidelines and basis for plans in the implementation of a work. Policy is understood as a direction or pattern of activities and not just a decision to carry out development planning. This study uses a literature method using a literature study approach by examining several international journal articles accessed from Scopus, in other words this research uses library materials without conducting field research. This research reveals that the sustainability of a development is certainly based on a policy and planning. Where these two aspects must be formulated in a structured manner and in accordance with the objectives. Development planning policy certainly requires a process that must be based on the needs of a region or country. Such planning policies need to be carried out by looking at several important aspects such as land use, urbanization, state and community support, development zones, climate change mitigation and cooperation. Of course, in this case, regulatory policies need to be carried out through various logical approaches. In this process, the government needs to involve stakeholders and the community by examining what are needed in the development planning process so as to produce good and mutually beneficial policies or regulations. The findings show the importance of cooperation and broad participation of various stakeholders, good cultural management. The limitation of this paper is the lack of data that is reviewed nationally because this paper is reviewed from international-based articles, but on the other hand this paper can be said to be in accordance with the basis of development planning policies. That way, the next paper needs to be done by comparing the implementation of a more conceptual development planning policy.

**Keywords:** *Policy, Planning, Society, Development.*

## **1. Pendahuluan**

Dalam sebuah negara tentunya tidak ada negara yang tidak melakukan pembangunan didalam negaranya. Pada dasarnya, pembangunan merupakan proses perubahan menuju sesuatu yang lebih baik. Artinya dalam sebuah negara adanya suatu pembangunan menjadi sebuah kemajuan untuk negara tersebut. Kondisi yang lebih baik dari keadaan sebelumnya menjadi tujuan tersendiri dari dilaksanakannya sebuah pembangunan. Dalam sebuah perencanaan pembangunan yang dilakukan tentu harus memperhatikan hal-hal penting yang mendukung terhadap setiap prosesnya. Sebuah perencanaan dilakukan untuk meminimalisir aspek-aspek yang dapat merugikan serta tidak berjalannya pembangunan sesuai tujuan. Dalam sebuah perencanaan tentu dibutuhkan sebuah kebijakan yang dapat dikatakan sebagai akar dari tercapainya tujuan dari pembangunan tersebut.

Kebijakan menurut kamus bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Pendapat lain oleh Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Dengan begitu berdasarkan pendapat dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan sebuah tindakan- tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau juga pemerintah yang di dalamnya terdapat sebuah unsur dan keputusan berupa upaya dari pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada, untuk mencapai dari sebuah maksud dan tujuan- tujuan tertentu.

Menurut Suharno (2010: 52-53) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). Dengan begitu, diperlukan sebuah evaluasi kebijakan yang dapat dikatakan sebagai kegiatan yang mencakup estimasi atau sebuah penilaian dari kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak yang akan terjadi. Evaluasi di pandang sebagai sebuah kegiatan yang fungsional. Sehingga dapat dikatakan, evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan perlu dilakukan dalam seluruh proses kebijakan perencanaan pembangunan. Dengan begitu, evaluasi

kebijakan perencanaan pembangunan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah dari suatu kebijakan, program- program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, maupun tahap dampak kebijakan dan implementasi kebijakan tersebut.

Keberlangsungan pembangunan tentu didasari oleh sebuah kebijakan dan perencanaan. Dimana kedua aspek tersebut harus dirumuskan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan. Kebijakan perencanaan pembangunan tentu memerlukan sebuah proses yang harus didasri dari kebutuhan suatu daerah atau negara. Proses tersebut dilakukan dengan cara mengevaluasi secara keseluruhan mulai dari sistem hingga lingkungan. Diperlukan sebuah kajian mendasar yang dilakukan dari penelitian sebelumnya sehingga menghasilkan penelitian terbaru sesuai dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, tujuan dari penulisan adalah untuk memberikan kajian terbaru mengenai kebijakan perencanaan pembangunan yang didasarkan dari artikel penelitian basis internasional. Dengan begitu penulis menyesuaikan dengan studi literatur artikel-artikel tersebut terhadap penyusunan argumen dan evaluasi yang mendalam sehingga hasil yang didapatkan akan sesuai dengan tema yang diangkat yaitu Kebijakan Perencanaan Pembangunan.

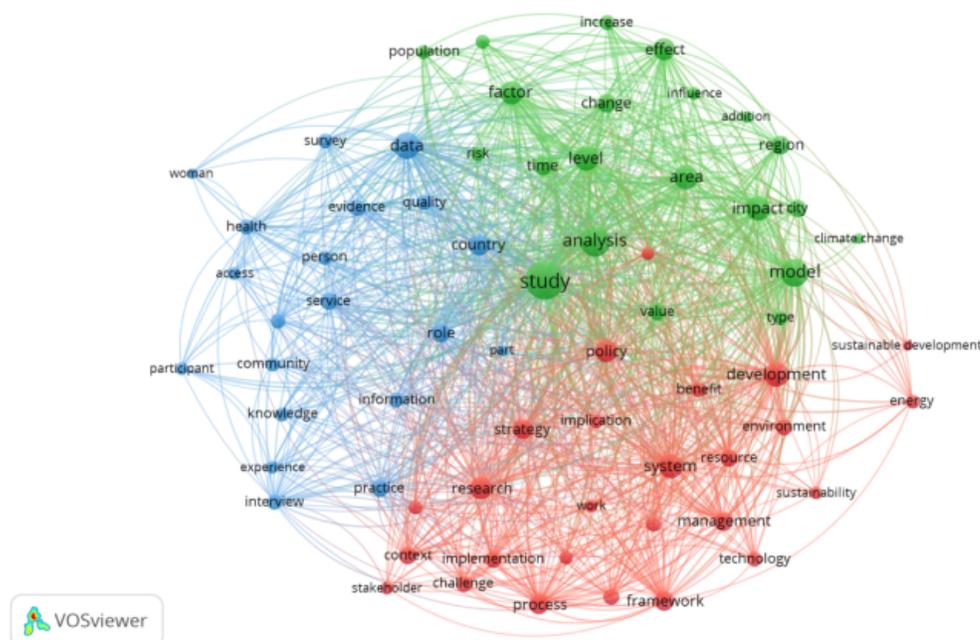
## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa artikel yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan pembangunan. Sumber data yang didapatkan berasal dari artikel yang bereputasi internasional. Kajian ini berdasarkan beberapa pertanyaan antara lain: (1) Bagaimana kebijakan yang seharusnya diterapkan dalam perencanaan pembangunan? (2) Apa tema yang dominan dalam studi kebijakan perencanaan pembangunan? (3) Topik apa saja yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan pembangunan? (4) Jenis pemetaan apa yang digunakan dalam kebijakan perencanaan pembangunan? (5) Konsep apa saja yang digunakan dalam studi kebijakan perencanaan pembangunan?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan pengkajian berdasarkan artikel yang ditemukan di databse Scopus. Tahapan artikel yang direview berdasarkan dua tahapan yaitu: Pencarian artikel, pemetaan topik, analisis topik dan konsep pembahasan terkait kebijakan perencanaan pembangunan.



Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data publikasi internasional yang berkaitan sesuai dengan tema penelitian yang didapatkan dari situs web [www.scopus.com](http://www.scopus.com) Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelusuran melalui Scopus dengan kata kunci Development, planning dan Policies dengan kategori article title, abstract, keywords dalam kurun tahun 2020-2021 dengan mendapatkan data Overlay Visualization di 2021.





- **Cluster 1**, terpetakan pada warna merah yang terdiri dari 26 item atau topik, yaitu : *benefit, challenge, context, development, energy, environment, evaluation, framework, government, implementation, implication, management, opportunity, prepective, policy, problem, process, research resource, stakeholder, strategy, sustainability, sustainable development, system, technology, dan work.*
- **Cluster 2**, terpetakan pada warna hijau yang terdiri dari 21 topik yaitu : *addition, analysis, area, change, city, climate change, difference, effect, factor, impact, increase, influence, level, model, population, region, risk, study, time, type, dan value.*
- **Cluster 3**, terpetakan pada warna biru yang terdiri dari 20 topik atau item, yaitu : *access, community, country, data, evidence, experience, health, information, interview, knowledge, outcome, part, participant, person, practice, quality, role, service, survey, dan woman.*

Pada **cluster pertama**, tema yang paling dominan dibahas oleh Fu, T, and Z Jian., tahun 2021 yang menegaskan tentang regulasi yang dirancang dengan baik dapat mendorong inovasi untuk solusi "win-win". Tentu dalam hal ini kebijakan regulasi perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan yang logis. Dalam proses tersebut pemerintah perlu melibatkan *stakeholder* dan masyarakat dengan mengkaji apa saja hal yang dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan sehingga melahirkan kebijakan atau regulasi yang baik dan saling menguntungkan. Dalam hal ini diperlukan sebuah perencanaan yang melibatkan dua arah atau lebih, antar pemerintah-masyarakat-*stakeholder*.

James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000: 17) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Dalam sebuah teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III yang dikutip oleh Budi Winarno, (2002: 126-151) faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

a) Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

b) Sumber-sumber.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

c) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

d) Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno, 2002 : 126-151).

Kebijakan dapat menunjang sebuah keefektifitas untuk mencapai sebuah tujuan dari adanya kebijakan tersebut. Dalam sebuah studi Mardiasmo (2009:132) berpendapat bahwa efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Pendapat H.Emerson yang dikutip Soewarno

Handayani S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Menurut Sejathi (2011), efektivitas merupakan “ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.” Soewarno Handayani (1983) dalam Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Ali Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingka kepuasan pengguna/*client*. Dalam menilai efektivitas program atau kebijakan, pendapat Tayibnafis (2000:23-36) dalam Ali Muhidin (2009) dirasa dapat menjelaskan berbagai pendekatan evaluasi. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu:

- a) Pendekatan eksperimental (*experimental approach*). Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.
- b) Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.
- c) Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*). Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.
- d) Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (*the user oriented approach*). Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada (*pre-existing condition*), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi dimana

evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.

- e) Pendekatan yang responsif (*the responsive approach*). Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (*stakeholder program*). Evaluator menghindari satu jawaban untuk suatu evaluasi program yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya secara unik. Evaluator mencoba menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskan atau menguraikan kenyataan melalui pandangan orang-orang tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami ihwal program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.

Dengan begitu efektifitas dapat dikatakan menjadi sebuah tolak ukur dari sebuah kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah terhadap perencanaan pembangunan. Efektifitas juga dapat menjadi acuan dari sebuah tercapainya tujuan yang sesuai dengan adanya kebijakan tersebut. Dalam membangun perencanaan tentu dibutuhkan sebuah partisipasi khususnya di masyarakat. Arimbi (1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai feed-forward information and feedback information. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

Hal tersebut tentu juga akan berkesinambungan pada indeks pembangunan berkelanjutan. Menurut Zhang, Y, Y Mao, L Jiao, C Shuai, and H Zhang, tahun 2021 menjelaskan bahwa era saat ini menentukan cara meningkatkan kualitas ekonomi, inovasi teknologi, dan kesejahteraan manusia dalam batas sumber daya dan lingkungan adalah tujuan pembangunan berkelanjutan global. Dengan demikian, penelitian tentang eko-efisiensi ,inovasi teknologi-eko dan kinerja kesejahteraan lingkungan memiliki arti penting untuk meningkatkan efisiensi pengubahan konsumsi ekologis menjadi manfaat ekonomi, inovasi teknologi, dan kesejahteraan manusia. Sedangkan pada penyesuaian aspek struktural, kawasan pusat dalam pengembangan pembangunan harus memanfaatkan industrialisasi dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang baik dapat diterapkan guna merancang kebijakan dan strategi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui inovasi teknologi dan perubahan struktural dengan menyesuaikan perkembangan dan kemajuan era.



Cluster	Author	Total
Cluster 1	Pada cluster pertama terdiri dari 22 author yaitu : chao,y, chen,c, guo,y, huang,y, jiang,h, li,q, li,x, liu,h, liu,q, wang,h, wang,j, wang,q, wang,z, wu,j, xu,c, xu,h, yang,j, yao,x, zhang,c, zhou,h, zhou,m.	22
Cluster 2	Cluster ke dua sebanyak 17 author yaitu : chen,l, chen,x, li,c, li,s, liu,j, lu,y, shi,y, song,y, wang,s, wang,x, wu,x, xu,j, yu,y, zhang,m, zhou,b, zhou,l, zhu,y.	17
Cluster 3	Pada cluster ke tiga sebanyak 14 author : chen,j, chen,q, chen,w he,j, li,y, li,z, liu,d, liu,x, wang,d, yang,y, zhang,h, zhang,q, zhang,s, zhou,y.	14
Cluster 4	Cluster ke empat memiliki 13 author : gao,j, huang,g, jiang,y, li,j, liu,l, sun,l, sun,s, xie,y, xu,x, xu,y, zhang,z, zhao,x, zhou,x.	13
Cluster 5	Cluster ke lima sebanyak 12 author yaitu : chen,y, li,h, liu,c, liu,g, liu,s, liu,y, sun,y, wang,l, zhang,j, zhang,l, zhao,y, zhou,z.	12
Cluster 6	Pada cluster ke enam terdiri dari 7 author : chen,h, liu,b, wang,g, wu,w, yang,x, zhang,x, zhang,y.	7
Cluster 7	Sedangkan pada cluster ke 7 terdiri dari 4 author : chen,z, li,l, liu,z,wu,y.	4
Cluster 8	Dan yang terakhir yaitu cluster 8 dengan 3 author : li,w, wang,c, wang,y.	3

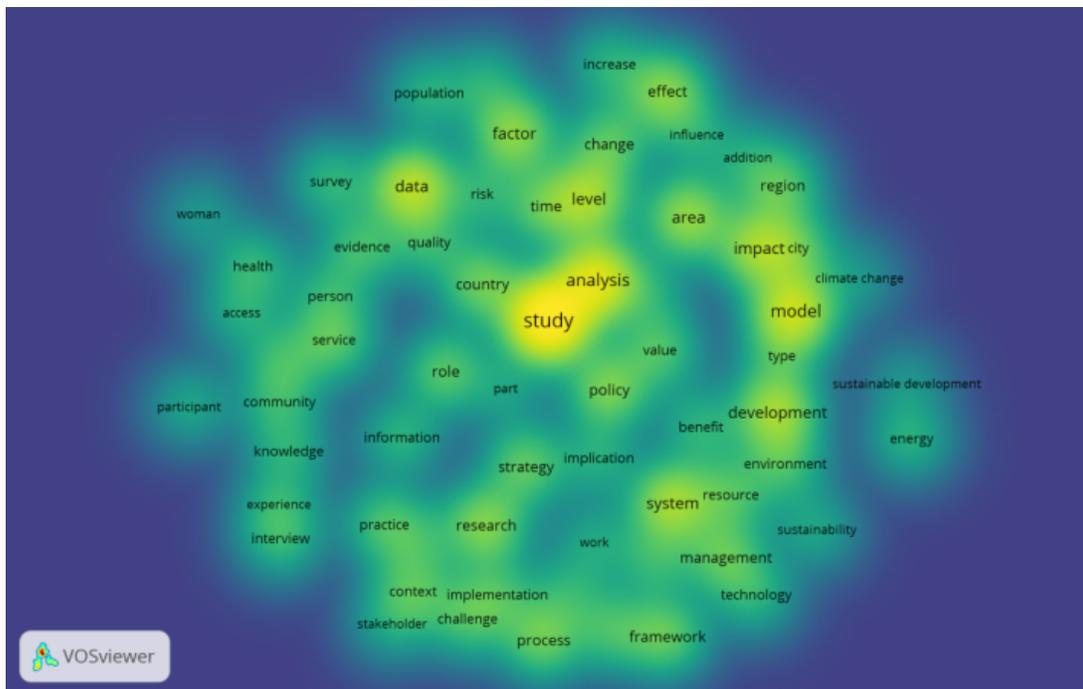
Mengutip dari artikel karya Wei, B, Y Li, A Suo, Z Zhang, Y Xu, and Y Chen, tahun 2021 berpendapat bahwa eksploitasi dan pemanfaatan zona pada pembangunan berkelanjutan secara langsung akan berdampak pada lingkungan. Pemanfaatan lingkungan menjadi sebuah prioritas tersendiri karena pengaruhnya terhadap *environmental change* maupun *climate change* pada suatu ekosistem kehidupan akan memiliki dampak yang berkepanjangan. Pendapat yang serupa juga disampaikan dalam penelitian terdahulu berdasarkan pengarang oleh Heikkila, T, C M Weible, K L Olofsson, J A Kagan, J You, and J Yordy, tahun 2021 menegaskan bahwa komposisi tertulis dari kebijakan publik adalah menyusun suatu sistem tata kelola lingkungan. Temuan ini menggambarkan sistem tata kelola lingkungan yang dipartisi dan dihubungkan ke dalam area fokus yang berbeda disebut “tindakan yang ditargetkan situasi ” melalui aktor, masalah, dan aturan tertentu.

Pada **cluster ke tiga** menurut Lee, J, J Arts, and F Vanclay, tahun 2021 berpendapat bahwa pandangan pemangku kepentingan tentang pengalaman hasil di berbagai daerah, dan tentang elemen dan proses penting yang diperlukan untuk meningkatkan hasil sosial. Hal ini dapat disangkutkkan dengan *outcome* yang menjadi kata dominan dalam *cluster* ke tiga, dimana kebijakan perencanaan pembangunan akan mempengaruhi hasil atau dampak yang akan terjadi dalam proses perencanaan pembangunan. Pendapat lain seperti Mustopadidjaja (2002:45) ikut menyatakan bahwa evaluasi implementasi kebijakan merupakan aktivitas dalam manajemen proses kebijakan yang dilakukan pada tahap pemantauan, pelaksanaan, pengawasan ataupun pertanggungjawaban. Kemudian, Dunn (Tahun 2003:108) juga berpendapat bahwa hasil kebijakan (*policy outcome*) merupakan

konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan. Sehingga dapat dikatakan perencanaan pembangunan dengan hasil atau dampak yang menguntungkan tergantung pada suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan *stakeholder* dan masyarakat atau publik.

### **b. Tema Dominan Pada Studi Kebijakan Perencanaan Pembangunan**

Dari penelusuran topik pembahasan terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan pembangunan ditemukan beberapa kata yang dominan. Diperoleh sebanyak 80 artikel dimana kata-kata yang memiliki keterhubungan dikelompokkan dalam satu *cluster*. Dimana tema yang dominan dari penelitian terdahulu ialah: manfaat, tantangan, konteks, pengembangan, energi, lingkungan, evaluasi, kerangka kerja, pemerintah, implementasi, implikasi, pengelolaan, peluang, prepektif, kebijakan, masalah, sumber penelitian proses, pemangku kepentingan, strategi, keberlanjutan, pembangunan berkelanjutan, sistem, teknologi, dan kerja. Tambahan, analisis, daerah, perubahan, kota, perubahan iklim, perbedaan, efek, faktor, dampak, meningkat, pengaruh, tingkat, model, populasi, wilayah, risiko, belajar, waktu, jenis, dan nilai. Kemudian akses, komunitas, negara, data, bukti, kesehatan, informasi, wawancara, pengetahuan, hasil, bagian, peserta, orang, kualitas praktik, peran, layanan, survei, dan pengalaman.



Dari gambar tersebut dapat dilihat tingkat ketebalan warna pada setiap kata atau tema menunjukkan bahwa kata atau tema tersebut merupakan yang paling dominan yang pernah dibahas oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan tiga kata kunci topik yaitu *development*, *planning* dan *policies*. Dimana keterhubungan antar kata atau tema tersebut mempunyai tingkatan pembahasan yang bagus sehingga jika di analisis dengan benar akan menghasilkan pembahasan yang kompleks terkait kebijakan perencanaan pembangunan.

#### **4. Kesimpulan**

Dalam sebuah kebijakan perencanaan pembangunan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan secara garis besar dapat ditentukan sebagai sebuah titik kemajuan dalam sebuah negara. Dalam merealisasikan sebuah pembangunan, perlu didasari oleh kebijakan dalam sebuah perencanaan pembangunan. Perlu adanya sebuah implementasi untuk mencapai sebuah suatu keberhasilan dalam kebijakan. Pengertian implementasi kebijakan dan fakto-faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan implementasi Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2004 : 79) juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yaitu :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber - sumber kebijakan.
3. Ciri -ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana.
5. Sikap para pelaksana.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat Menurut M. Irfan Islamy (2009 :102-106) untuk mengefektifkan kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan membagitahap implementasi dalam 2 bentuk yaitu :

1. *Self-executing*, yaitu bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terealisasi dengan sendirinya.
2. *Non self-executing*, yaitu bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Adanya kebijakan pemerintah tersebut menjadi sebuah kebijakan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah maupun negara. Dengan begitu pembangunan tersebut dapat terealisasikan sebagaimana tujuan yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam proses tersebut, SDM menjadi salah satu tantangan dalam keterbatasan sebuah kebijakan perencanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi dari publik atau masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan dalam sebuah pembangunan yang akan berindikasi terhadap alih kebijakan yang di kontrol oleh pemerintah secara keseluruhan yang bisa berdampak

terhadap kebijakan yang hanya menguntungkan pemerintah atau pemangku kepentingan lain. Mubyarto (1997:35) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Dengan begitu rekomendasi yang perlu disajikan adalah seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, *stakeholder*, swasta dan yang lain dapat terlibat. Dimana para pemangku kepentingan tersebut memiliki kewajiban tersendiri untuk terlibat dalam perumusan kebijakan dan *control section*.

### **Daftar Pustaka**

- Adekola, O, P Krigsholm, and K Riekkinen. 2021. "Towards a Holistic Land Law Evaluation in Sub-Saharan Africa: A Novel Framework with an Application to Rwanda's Organic Land Law 2005." *Land Use Policy* 103. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105291>.
- Allred, S, R Stedman, L Heady, and K Strong. 2021. "Incorporating Biodiversity in Municipal Land-Use Planning: An Assessment of Technical Assistance, Policy Capacity, and Conservation Outcomes in New York's Hudson Valley." *Land Use Policy* 104. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105344>.
- Alola, A A, and S S Akadiri. 2021. "Clean Energy Development in the United States amidst Augmented Socioeconomic Aspects and Country-Specific Policies." *Renewable Energy* 169: 221–30. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.01.022>.
- Chen, Y, H Nie, J Chen, and L Peng. 2021. "Regional Industrial Synergy: Potential and Path Crossing the 'Environmental Mountain.'" *Science of the Total Environment* 765. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142714>.
- Dobravec, V, N Matak, C Sakulin, and G Krajačić. 2021. "Multilevel Governance Energy Planning and Policy: A View on Local Energy Initiatives." *Energy, Sustainability and Society* 11 (1). <https://doi.org/10.1186/s13705-020-00277-y>.
- Duan, H, Y Xie, T Du, and X Wang. 2021. "Random and Systematic Change Analysis in Land Use Change at the Category Level—A Case Study on Mu Us Area of China." *Science of the Total Environment* 777. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145920>.
- Gabbe, C J, M Kevane, and W A Sundstrom. 2021. "The Effects of an 'Urban Village' Planning and Zoning Strategy in San Jose, California." *Regional Science and Urban Economics* 88. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2021.103648>.
- Jelinčić, D A, and S Tišma. 2021. "Ensuring Sustainability of Cultural Heritage through Effective Public Policies." *Urbani Izziv* 31 (2): 78–87. <https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-en-2020-31-02-002>.
- Lee, J, J Arts, and F Vanclay. 2021. "Stakeholder Views about Land Use and Transport Integration in a Rapidly-Growing Megacity: Social Outcomes and Integrated Planning Issues in Seoul." *Sustainable Cities and Society* 67. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102759>.
- Poku-Boansi, M. 2021. "Multi-Stakeholder Involvement in Urban Land Use Planning in the Ejisu Municipality, Ghana: An Application of the Social Complexities' Theory." *Land Use*

- Policy 103. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105315>.
- Raparthi, K. 2021. "Assessing the Relationship between Urban Planning Policies, Gender, and Climate Change Mitigation: Regression Model Evaluation of Indian Cities." *Journal of Urban Planning and Development* 147 (2). [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)UP.1943-5444.0000677](https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000677).
- Adekola, O, P Krigsholm, and K Riekkinen. 2021. "Towards a Holistic Land Law Evaluation in Sub-Saharan Africa: A Novel Framework with an Application to Rwanda's Organic Land Law 2005." *Land Use Policy* 103. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105291>.
- Allred, S, R Stedman, L Heady, and K Strong. 2021. "Incorporating Biodiversity in Municipal Land-Use Planning: An Assessment of Technical Assistance, Policy Capacity, and Conservation Outcomes in New York's Hudson Valley." *Land Use Policy* 104. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105344>.
- Aloia, A A, and S S Akadiri. 2021. "Clean Energy Development in the United States amidst Augmented Socioeconomic Aspects and Country-Specific Policies." *Renewable Energy* 169: 221–30. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.01.022>.
- Chen, Y, H Nie, J Chen, and L Peng. 2021. "Regional Industrial Synergy: Potential and Path Crossing the 'Environmental Mountain.'" *Science of the Total Environment* 765. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142714>.
- Dobracev, V, N Matak, C Sakulin, and G Krajačić. 2021. "Multilevel Governance Energy Planning and Policy: A View on Local Energy Initiatives." *Energy, Sustainability and Society* 11 (1). <https://doi.org/10.1186/s13705-020-00277-y>.
- Duan, H, Y Xie, T Du, and X Wang. 2021. "Random and Systematic Change Analysis in Land Use Change at the Category Level—A Case Study on Mu Us Area of China." *Science of the Total Environment* 777. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145920>.
- Gabbe, C J, M Kevane, and W A Sundstrom. 2021. "The Effects of an 'Urban Village' Planning and Zoning Strategy in San Jose, California." *Regional Science and Urban Economics* 88. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2021.103648>.
- Jelinčić, D A, and S Tišma. 2021. "Ensuring Sustainability of Cultural Heritage through Effective Public Policies." *Urbani Izziv* 31 (2): 78–87. <https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-en-2020-31-02-002>.
- Lee, J, J Arts, and F Vanclay. 2021. "Stakeholder Views about Land Use and Transport Integration in a Rapidly-Growing Megacity: Social Outcomes and Integrated Planning Issues in Seoul." *Sustainable Cities and Society* 67. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102759>.
- Poku-Boansi, M. 2021. "Multi-Stakeholder Involvement in Urban Land Use Planning in the Ejisu Municipality, Ghana: An Application of the Social Complexities' Theory." *Land Use Policy* 103. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105315>.
- Raparthi, K. 2021. "Assessing the Relationship between Urban Planning Policies, Gender, and Climate Change Mitigation: Regression Model Evaluation of Indian Cities." *Journal of Urban Planning and Development* 147 (2). [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)UP.1943-5444.0000677](https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000677).
- Saha, A, and R Roy. 2021. "An Integrated Approach to Identify Suitable Areas for Built-up Development Using GIS-Based Multi-Criteria Analysis and AHP in Siliguri Planning

- Area, India.” *SN Applied Sciences* 3 (4). <https://doi.org/10.1007/s42452-021-04354-5>.
- Shen, J, X Guo, and Y Wang. 2021. “Identifying and Setting the Natural Spaces Priority Based on the Multi-Ecosystem Services Capacity Index.” *Ecological Indicators* 125. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107473>.
- Truong-Ba, H, M E Cholette, P Borghesani, L Ma, and G Kent. 2021. “Condition-Based Inspection Policies for Boiler Heat Exchangers.” *European Journal of Operational Research* 291 (1): 232–43. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.09.030>.
- Uyttebrouck, C, H Remøy, and J Teller. 2021. “The Governance of Live-Work Mix: Actors and Instruments in Amsterdam and Brussels Development Projects.” *Cities* 113. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103161>.
- Wang, H, F Qin, C Xu, B Li, L Guo, and Z Wang. 2021. “Evaluating the Suitability of Urban Development Land with a Geodetector.” *Ecological Indicators* 123. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107339>.
- Wang, Y, H Hu, W Dai, and K Burns. 2021. “Evaluation of Industrial Green Development and Industrial Green Competitiveness: Evidence from Chinese Urban Agglomerations.” *Ecological Indicators* 124. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107371>.
- Wei, B, Y Li, A Suo, Z Zhang, Y Xu, and Y Chen. 2021. “Spatial Suitability Evaluation of Coastal Zone, and Zoning Optimisation in Ningbo, China.” *Ocean and Coastal Management* 204. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105507>